

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan ialah suatu persoalan pembangunan yang paling mendasar di Indonesia dan menjadi masalah kompleks yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Meskipun Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif selama dua dekade terakhir, masalah kemiskinan tetap menjadi fenomena yang sulit diatasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, total penduduk miskin Indonesia tercatat sebanyak 26,16 juta orang, atau yakni 9,36% dari total penduduk (BPS, 2023). Ini memaparkan jikalau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tidak selalu berkorelasi langsung dengan penurunan tingkat kemiskinan.

Konsep kemiskinan modern tidak hanya dipahami dalam kerangka kekurangan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan partisipasi dalam proses sosial. Todaro dan Smith (2020) menyatakan jikalau kemiskinan harus dilihat sebagai kekurangan kapabilitas, yakni ketidakmampuan seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermartabat. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan tidak hanya berarti meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperluas akses terhadap berbagai peluang pembangunan. Sejalan dengan itu, Alkire dan Santos (2021) menekankan pentingnya mengukur kemiskinan dari perspektif multidimensi, bukan sekadar garis pendapatan semata.

Salah satu faktor struktural yang berkontribusi besar terhadap kemiskinan di Indonesia adalah ketidaksetaraan gender. Gender ialah konstruksi sosial yang menentukan peran, hak, dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Ketidaksetaraan gender menyebabkan perempuan mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan formal, layanan kesehatan, serta kepemilikan aset produktif. Hal ini secara langsung memperburuk kerentanan perempuan terhadap kemiskinan. Berdasarkan laporan Global Gender

*Gap Report 2022* yang dipaparkan oleh *World Economic Forum*, Indonesia menempati posisi 92 dari 146 negara dalam hal kesetaraan gender (WEF, 2022), dengan skor rendah dalam partisipasi ekonomi dan representasi politik perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar, yaitu: kesehatan (diukur melalui harapan hidup saat lahir), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui estimasi pendapatan per kapita). IPG merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menyesuaikan capaian berdasarkan jenis kelamin (BPS, 2022).

Nilai IPG mendekati 100 menunjukkan tingkat kesetaraan yang tinggi antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil nilai IPG, maka semakin besar ketimpangan gender yang terjadi. Berdasarkan laporan BPS (2020) dan UNDP (2020), IPG (2022) Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 91,07 dan mengalami peningkatan bertahap menjadi 91,74 pada tahun 2024. Meski menunjukkan tren positif, angka ini masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Thailand dan Filipina yang mencatatkan IPG di atas 93. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pendapatan, dan layanan kesehatan.

Ketimpangan yang tercermin dalam IPG tersebut berdampak langsung pada efektivitas perempuan dalam mengakses pekerjaan layak dan pendidikan berkualitas, sehingga memperkuat siklus kemiskinan. Oleh karena itu, IPG menjadi indikator strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Kajian dari UNDP (2022) juga menegaskan bahwa negara-negara dengan IPG yang lebih tinggi umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, karena perempuan berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi rumah tangga dan Masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender Indonesia, berdasarkan data *United Nations Development Programme 2022*, hanya mencapai nilai 0,697, memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam perolehan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan (UNDP, 2022). Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa perempuan, meskipun memiliki potensi besar dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional, masih belum mendapatkan kesempatan yang setara. Penelitian Kabeer (2018) menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan cenderung lebih rentan ke kemiskinan jika dikomparasikan dengan laki-laki. Selain itu, studi Chant (2020) juga menggarisbawahi bahwa feminisasi kemiskinan semakin menjadi tren global, termasuk di negara-negara berkembang.

Menurut World Bank (2021), peningkatan partisipasi ekonomi perempuan sebesar 10% dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 2%. Ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya merupakan persoalan moral, tetapi juga persoalan ekonomi yang strategis. Pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pendidikan, keterampilan kerja, akses terhadap layanan keuangan, dan perlindungan sosial merupakan langkah krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menjadi variabel penting yang sering dikaitkan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui efek perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung terhadap kelompok miskin apabila pertumbuhan tersebut tidak bersifat inklusif. Menurut Ravallion (2021), pertumbuhan ekonomi hanya efektif dalam mengurangi kemiskinan apabila disertai dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang adil. Duflo dan Topalova (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan distribusi manfaat pembangunan secara merata justru memperbesar ketimpangan dan mempertahankan tingkat kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, keterkaitan antara gender, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian empiris. Fitriani (2021) menemukan bahwa perempuan dengan pendidikan rendah dan tanggungan keluarga yang tinggi memiliki risiko lebih besar untuk hidup di bawah garis kemiskinan. Senada dengan itu, Rahmah (2022) mencatat bahwa keterbatasan akses perempuan terhadap pekerjaan formal di wilayah pedesaan meningkatkan risiko kemiskinan struktural.

Penelitian Nasution (2023) menyatakan bahwa provinsi-provinsi dengan indeks pembangunan gender yang minim cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini memaparkan jikalau rendahnya capaian pembangunan perempuan menjadi faktor krusial dalam memperparah kondisi kemiskinan di berbagai daerah. Sementara itu, Hartini dan Nurhadi (2020) menegaskan bahwa kesetaraan gender berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia, terutama melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan formal.

Selain itu, Ravallion (2021) menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional belum inklusif, karena belum mampu secara efektif mengurangi kemiskinan pada kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan dan pengangguran muda. Duflo dan Topalova (2021) juga menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam akses terhadap hasil pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pada kelompok perempuan dan masyarakat di wilayah tertinggal. Ketimpangan ini berdampak pada persistennya kemiskinan struktural meskipun indikator makroekonomi menunjukkan kinerja positif.

Untuk memperkuat analisis tersebut, berikut disajikan data pendukung tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat kemiskinan, IPG, TPT, dan Pertumbuhan Ekonomi**

Tahun	Kemiskinan (%)	IPG	TPT (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	10.19	91.07	7.07	-2.07
2021	9.71	91.27	6.49	3.69
2022	9.54	91.63	5.86	5.31
2023	9.36	91.63	5.32	5.05
2024	9.03	91.74	5.00	5.20

*Sumber : BPS Indonesia*

Berdasarkan data tahun 2020 hingga 2024, Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam indikator sosial-ekonomi utama seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Gender (IPG), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan pertumbuhan ekonomi. Data ini penting untuk dianalisis guna memahami keterkaitan antara peran kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan secara makro.

Tingkat kemiskinan nasional memperoleh degradasi bertahap dari 10,19 persen pada tahun 2020 menjadi 9,03 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan adanya progres dalam upaya pengentasan kemiskinan, meskipun laju penurunannya relatif melambat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, tantangan struktural dalam mengatasi kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di wilayah dengan ketimpangan pembangunan yang tinggi.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun terjadi secara marginal. Dari 91,07 pada tahun 2020 menjadi 91,74 pada tahun 2024, peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya menciptakan kesetaraan gender di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPG yang mendekati angka 100 menunjukkan semakin kecilnya

kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, peningkatan IPG dapat menjadi sinyal positif bagi kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan dari 7,07 persen pada tahun 2020 menjadi 5,00 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam pasar tenaga kerja, yang kemungkinan besar didorong oleh pemulihan ekonomi serta berbagai kebijakan pemerintah dalam membuka lapangan kerja. Namun demikian, angka pengangguran ini tetap harus ditinjau lebih dalam, terutama dalam konteks partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pola pemulihan yang konsisten pasca kontraksi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen akibat dampak pandemi. Sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan hingga mencapai 5,20 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan stabilitas ekonomi nasional yang berangsur pulih. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya dapat dicapai jika seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan kerja.

Dengan mempertimbangkan keempat indikator ini secara simultan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesetaraan gender sebagaimana tercermin dalam IPG yang membaik, memiliki potensi besar dalam mendukung penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara empiris bagaimana peran kesetaraan gender dapat berkontribusi secara nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud guna menganalisis pengaruh kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dengan menggunakan

data panel antar provinsi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana pengaruh IPG terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana interaksi antara kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian yakni:

1. Menganalisis pengaruh IPG terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Menjelaskan interaksi antara kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek, antara lain:

1. Manfaat Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur akademik yang berkaitan dengan analisis hubungan

antara kesetaraan gender dan kemiskinan, khususnya dalam konteks pembangunan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait pada penentuan kebijakan yang menyokong peningkatan kesetaraan gender sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
3. Manfaat Sosial: Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat mengenai krusialnya kesetaraan gender sebagai pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Variabel kesetaraan gender diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang merefleksikan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada tingkat provinsi.

Variabel pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi atas dasar harga konstan. Sementara itu, variabel tingkat pengangguran dikalkulasi melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan tetapi sedang aktif mencari kerja.

Adapun variabel kemiskinan ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin terhadap total populasi di tiap provinsi. Penelitian ini mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia, dengan periode waktu tahun 2014 hingga 2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan data panel yang menggabungkan dimensi waktu dan wilayah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam enam bab, dengan uraian sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS**

Membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti teori kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran; kajian penelitian terdahulu; hubungan antar variabel; serta penyusunan hipotesis penelitian dan kerangka teoritis.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan jenis penelitian, sumber dan jenis data, metode analisis (data panel), definisi operasional variabel, dan teknik pengujian model serta uji asumsi klasik.

### **BAB IV: GAMBARAN UMUM DAN DATA PENELITIAN**

Berisi uraian tentang kondisi umum kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran di Indonesia secara deskriptif berdasarkan data antar provinsi dan tahun.

### **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menyajikan hasil analisis regresi data panel, pengujian hipotesis, interpretasi hasil, serta pembahasan yang mengaitkan temuan empiris dengan teori dan studi sebelumnya.

### **BAB VI: PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi kebijakan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.